

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN SOSIAL TUNAI

M. Daimul Abror¹⁾ *Anna Chrysdian²⁾, I Gusti Gede Heru Marwanto³⁾

1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri

*Email Korespondensi: annachrysdiana@unik-kediri.ac.id

Submitted: 14-12-2023 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

<p>Kata Kunci: <i>MSN approach, implementasi kebijakan public, bantuan sosial</i></p>	<p>Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana Keputusan Menteri Sosial mengenai Bantuan Sosial Tunai dalam pelaksanaannya di Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk serta faktor yang mendukung dan menghambatnya. Untuk menjawab sasaran dalam penelitian tersebut, Teknik yang digunakan oleh para ahli adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam <i>mentality approach</i> terkait dengan sikap, perilaku, maupun tanggungjawab aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam perspektif <i>system approach</i>, pada aspek regulasi ternyata penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Sedangkan pemerintah Kelurahan hanya berfungsi mensosialisasikan dan mengawal penyaluran BST dan tidak mampu merubah ketentuan pusat tersebut. yang menjadi pendukung utama meliputi aspek mental aparatur pemerintah Kelurahan dalam <i>mentality approach</i> dan <i>networking approach</i> baik pada indicator kemitraan strategis, sinergitas, maupun simbiosis mutualismenya. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat didominasi dari aspek mental warga dalam <i>mentality approach</i> dan <i>System approach</i> baik pada indicator regulasi, nilai budaya, maupun struktur & fungsi organisasinya.</p>
<p>Keywords: <i>MSN Approach, Public Policy Implementation, Social Assistance</i></p>	<p>Abstract <i>This research aims to describe and analyze the implementation of Minister of Social Affairs Decree number 54 of 2020 concerning Cash Social Assistance in Payaman Village, Kec. Nganjuk Regency Nganjuk and also the supporting and inhibiting factors. To answer the research objectives, the research method used by researchers is qualitative research with a descriptive research type. Based on the results of interviews and observations, the research results show that the mentality approach is related to the attitudes, behavior and responsibilities of sub-district government officials. From a system approach perspective, in the regulatory aspect it turns out that the determination of Beneficiary Families (KPM) has been determined by the central government, in this case the Ministry of Social Affairs. Meanwhile, the sub-district government only functions to socialize and oversee the distribution of BST and is unable to change the</i></p>

central regulations. which is the main support includes the mental aspects of sub-district government officials in their mentality approach and networking approach, both in terms of indicators of strategic partnerships, synergy and symbiotic mutualism. Meanwhile, the factors that become obstacles are dominated by the mental aspects of citizens in the mentality approach and systems approach, both in terms of regulatory indicators, cultural values, and the structure & function of the organization.

PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi problem dasar yang langsung berhubungan dengan ketahanan manusia. Kemiskinan sering dimaknai sebagai kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara layak, baik berupa kekurangan pangan, pakaian layak pakai, dan lainnya (Bhinadi, 2017). Problematika kemiskinan di Indonesia tidak pernah tuntas, program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan ternyata masih belum mampu mengatasi kemiskinan di Indonesia (Supriatna, 2000).

Masalah kemiskinan sudah sangat lama terjadi, dan dalam kurun waktu yang sangat lama sama seperti keberadaan manusia itu sendiri, dan komponen-komponen utama dari masalah ini berkaitan dengan berbagai struktur atau kualitas keberadaan manusia. Oleh karena itu kemiskinan merupakan persoalan hidup yang sangat mendunia yang menyiratkan bahwa persoalan kemiskinan telah menjadi perhatian dunia dan persoalan ini terjadi di semua negara, meskipun dampak dari kemiskinan sangat berbeda (TNP2K, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kurang mampu pada September 2022 sebanyak 27,55 juta jiwa meningkat 1,13 juta jiwa dibandingkan tahun 2020 bertambah 2,76 juta jiwa dibandingkan September 2019. Informasi ini menunjukkan bahwa latihan atau kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh otoritas public sebagai pencipta strategi dalam mengatasi kemiskinan belum memberikan hasil yang baik. Kenyataannya ini menunjukkan bahwa semua proyek yang dilakukan untuk meringankan kemiskinan di negara ini belum memberikan perubahan besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Mengembangkan lebih lanjut bantuan individu dari pemerintah sangat penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu : mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi variasi antar bidang wilayah,

meningkatkan kualitas manusia, memperbaiki sifat dari lingkungan, dan mengawasi sumber daya alam dan mengembangkan infrastruktur lebih lanjut lagi (Malik, 2018).

Maksud dari perbaikan bansos pemerintah adalah tercapainya kondisi bantuan social pemerintah yang adil dan tidak memihak serta terlaksananya kerangka bantuan pemerintah yang ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk kehidupan kebudayaan Indonesia dengan tujuan akhir menjadi negara maju, bebas dan siap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Diatmika & Rahayu, 2022), mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan suatu strategi, program dan Gerakan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, perkumpulan atau masyarakat yang tidak mem[unyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (YESIKA, 2021)

Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima manfaat, dimana setiap individu mendapatkan bantuan Rp. 200.000 setiap bulannya. Pemberian kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan motivator setelah persiapan sebesar Rp. 600.000 untuk waktu lama. Memberikan Batasan tarif daya 900 VA dan pengecualian tarif daya 450 VA. Mengenai Program BST, telah diatur dalam Pengumuman Pendeta Partai no. 54/HUK/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Uang Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Virus Corona. Strategi ini diberikan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendekatan Moneter Negara dan Kemantapan Kerangka Moneter untuk Menangani Pandemi Penyakit Covid (*Coronavirus*) Tahun 2019 atau Berpotensi Menghadapi Bahaya. Membahayakan Perekonomian Masyarakat atau berpotensi Keamanan Kerangka Moneter bagi individu yang terkena dampak Penyakit Covid 2019 (*Coronavirus*) (Teguh Imam Rahayu, 2020). Sesuai dengan Deklarasi Penggembala Para Pihak, Bantuan Sosial Uang (BST) diberikan dalam bentuk uang kepada 9 (9.000.000) keluarga miskin, tertindas, dan lemah yang terkena dampak pandemi virus Corona yang tersebar di 33 wilayah di Indonesia (Sasuwuk et al., 2021).

Berasarkan pra penelitian, permasalahan yang terjadi di Kota Payaman terkait dengan program bansos tunai adalah pengumpulan informasi tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Payaman, melainkan oleh pihak Kementrian Sosial. Pengumpulan informasi sebaiknya dilakukan oleh Lurah, karena bantuan ini merupakan program lain

yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Siklus pengumpulan informasi sebaiknya dilakukan oleh kepala kelurahan kemudian dikirim oleh camat kemudian ke dinas sosial kemudian ke Kementerian Sosial. Kemudian, informasi yang diperoleh Kemensos dari para camat dan individu yang mendapat bantuan serupa. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah daerah Payaman dan menyebabkan pengumpulan informasi tidak sesuai jalur.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari judul yang akan penulis teliti, terlihat bahwa jenis penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi subjek secara keseluruhan, oleh karena itu penelitian ini melihat kondisi tujuan tertentu dan ilmuwan bertindak sebagai instrumen penelitian. Intisari penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2017) adalah:

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Penelitian kualitatif dinilai sangat tepat digunakan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, karena penelitian ini memberikan peluang yang cukup bagi para analis untuk memberdayakan para ahli untuk membidik permasalahan yang akan penulis teliti secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

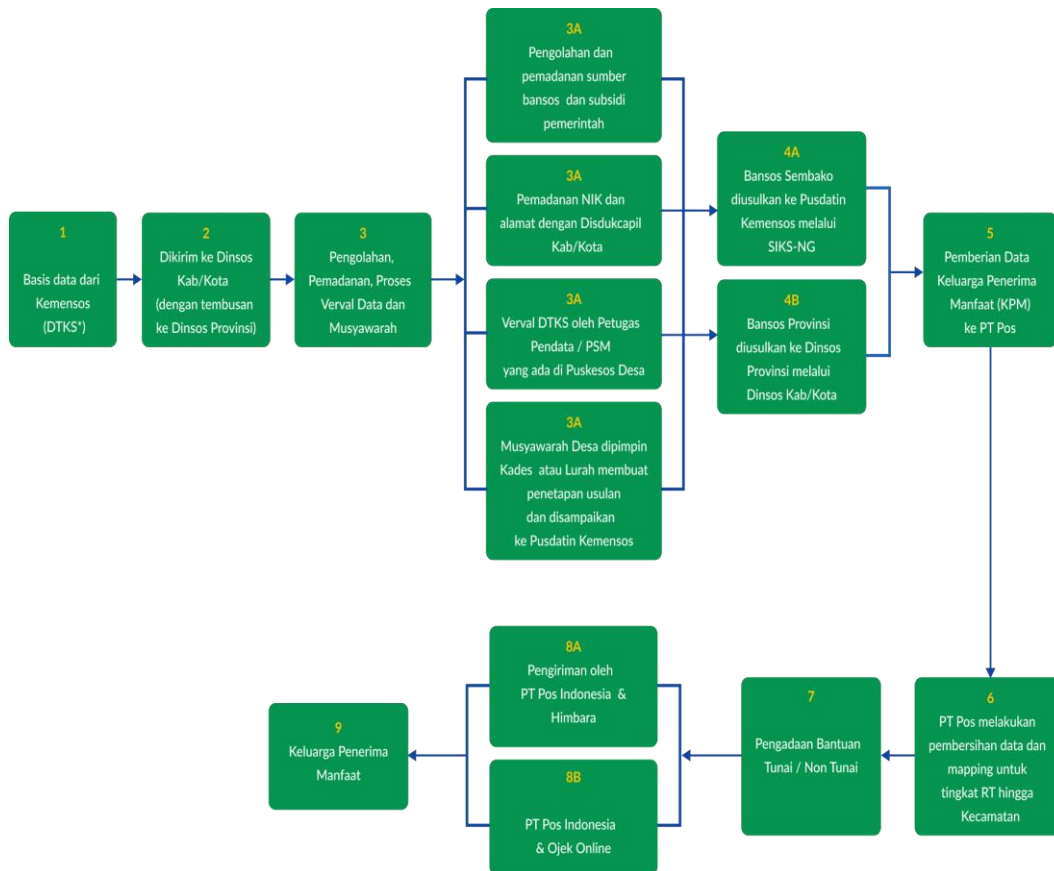
Pemerintah Kelurahan Payaman memiliki 13 pegawai yang terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, Kepala Seksi Ketentraman, ketertiban, dan pemerintahan umum, Pramu kebersihan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan kantor, tenaga penjaga malam kantor, modin, babinkamtibmas, dan babinsa.

Tabel.1 Pegawai Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk

NO	NAMA	JABATAN
1	ATIK SETYA RAHAYU, SE	Lurah
2	ANNA CHRYSDIANA, S.Sos	Sekretaris Kelurahan
3	AGUS HUDAYANTO, SE	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum
4	HARTONO	Pramu Kebersihan
5	FATIMATUL MUAKHIRIN	Tenaga Administrasi
6	DECY DWI KARTIKASARI	Tenaga Administrasi
7	ANDRIK WAHYUDI	Tenaga Administrasi
8	WIJIANTO	Tenaga Kebersihan Kantor
9	SUROTO	Tenaga Penjaga Malam Kantor
10	M. SAHLI	Modin
11	GAYUT RISWANTORO	Babinkamtibmas
12	ABDUL QODIR	Babinsa
13	QOMARUDIN	Babinsa

Sumber: Kelurahan Payaman, 2023

Sedangkan secara kewilayahan, kelurahan payaman terdiri dari 28 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 10 Rukun Warga (RW). Untuk RW 01 dan RW 09 masing-masing terdiri dari 4 RT. Sedangkan RW 02, RW 04, RW 08 dan RW 10 masing-masing terdiri dari 3 RT. Adapun untuk RW 03, RW 05, RW 06, dan RW 07 masing-masing terdiri dari 2 RT



Gambar.1 Alur Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Di Kelurahan Payaman, adanya penyaluran BST ini jika ditelusuri dari pihak aparaturnya terjadi perubahan yang cukup positif. Permasalahan juga muncul pada kemampuan asosiasi dalam melakukan peruntukan BST, terutama bagi ketua RT yang mengelola warga lingkungan yang seringkali mendapatkan informasi mengenai standar pemerataan BST kepada seluruh penduduk kelurahan. Indikator yang berkaitan dengan kemitraan strategis dan sinergitas dalam implementasi Kebijakan BST di Kelurahan Payaman cukup terlihat bagus terutama antara pihak pemerintah Kelurahan dengan PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran BST kepada KPM. Adapun kemitraan strategis dan sinergitas dalam proses penyaluran BST baik antara Kepala Kelurahan, panitia, Ketua RT, dan Ketua RW semuanya mampu berperan sesuai tugasnya masing-masing untuk mempercepat proses penyaluran BST tersebut.

1. Faktor-faktor pendukung

Dari ketiga pendekatan dalam implementasi kebijakan BST di Kelurahan Payaman, faktor yang mendukung terutama pada pendekatan *networking*, Indikator yang berkaitan dengan kemitraan strategis dan sinergitas dalam implementasi Kebijakan BST di Kelurahan Payaman cukup terlihat bagus terutama antara pihak pemerintah Kelurahan dengan PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran BST kepada KPM Adapun kemitraan strategis dan sinergitas lain dalam proses penyaluran BST baik antara Kepala Kelurahan, panitia, Ketua RT, dan Ketua RW semuanya mampu berperan sesuai tugasnya masing-masing untuk mempercepat proses penyaluran BST tersebut. Adapun indikator saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung. Dalam konteks implementasi BST di Kelurahan Payaman ini ketiga subsistem tersebut cukup terpenuhi.

2. Faktor penghambat

Sedangkan factor-faktor yang menjadi penghambat didominasi dari pendekatan mental dan *System*. Dalam aspek *mentality* masalah terutama menyangkut tentang perilaku dan sikap masyarakat penerima BST. Terdapat permasalahan dari warga khususnya dari masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja buruh tani yang sikapnya cenderung semakin bergantung dengan kehadiran BST ini. Hal ini terlihat dari menurunnya tekad masyarakat yang selama ini menjadi pekerja di pedesaan dan umumnya masih tetap percaya bahwa bantuan akan terus muncul di masa depan. Jadi bantuan ini Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Kelurahan hanya berfungsi mengawal penyaluran BST dan tidak bisa mengintervensi regulasi tersebut yang pada akhirnya memunculkan protes dari warga yang tidak menerima BST. Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mencoba menganalisis data dan informasi yang di dapat di lapangan tentang implementasi kebijakan BST di Kelurahan Payaman dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik perspektif pendekatan mentalis, system, dan jejaring yang digagas oleh (Wahyu & Hidayat, 2022). Menurut pandangan aparaturnya Pemerintah Kelurahan, baik dari segi watak, perilaku dan kewajibannya, hal ini telah menumbuhkan mentalitas peduli terhadap pengalaman yang dialami oleh warganya, mampu berperilaku dengan terus mendidik warga yang tidak paham BST supaya menerima Keputusan yang sudah ada dan ditetapkan dari pusat.

Sedangkan kepada warga yang masuk KPM penerima BST, pemerintah kelurahan mengawalinya dalam proses sosialisasi dan penyaluran BST.

Meski demikian, hasil penelitian dari sisi warga menunjukkan berbagai latarbelakang dari pekerjaannya. Sikap masyarakat yang berperan sebagai pekerja di buruh tani cenderung semakin bergantung pada BST ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya rasa percaya diri masyarakat yang selama ini menjadi buruh tani dan pada umumnya selalu percaya bahwa bantuan akan terus muncul di kemudian hari. Jadi bantuan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lain halnya dengan penduduk yang bekerja sebagai pedagang kecil. Pola pikir mereka secara umum akan lebih pasti. Dimana mereka semakin bersemangat karena mendapatkan uang agar bisa mulai berjualan lagi

Akan tetapi sikap, perilaku dan tanggungjawab ini akan menuju pada dua hal, yaitu berubah ke yang lebih baik dan berubah ke yang lebih buruk atau berdampak buruk. Sedangkan pemerintah Kelurahan hanya berfungsi mensosialisasikan dan mengawal penyaluran BST dan tidak mampu merubah ketentuan pusat tersebut. Realitas ini menyebabkan banyak warga yang tidak mendapatkan BST meskipun seccara kondisi social dan ekonomi seharusnya layak menerima BST.

Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan Dimana dalam proses penyaluran BST baik antara PT Pos Indonesia, Kepala Kelurahan, panitia, Ketua RT, dan Ketua RW semuanya mampu berperan sesuai tugasnya masing-masing untuk mempercepat proses penyaluran BST tersebut.

Pemerintah dalam menjalankan kewajiban dan komitmennya sesuai dengan sudut pandang pelaksanaan strategi, harus bergantung dan bergantung pada kolaborasi dari rasa keseragaman dan bisa terbuka, serta memberikan keuntungan bersama satu sama lain, di dalam sistem. mengakui kepentingan bersama dalam membangun negara yang lebih lengkap dan menjangkau lebih jauh. faktor yang menjadi pendukung utama meliputi aspek *Networking approach* dalam implementasi kebijakan BST, dimana dalam proses penyaluran BST baik antara PT Pos Indonesia, Kepala Kelurahan, panitia, Ketua RT, dan Ketua RW semuanya mampu berperan sesuai tugasnya masing-masing untuk mempercepat proses penyaluran BST tersebut.

Faktor penghambat dalam aspek *system approach*, terutama pada indikator regulasi dimana penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Sedangkan pemerintah Kelurahan hanya berfungsi mensosialisasikan dan mengawal penyaluran BST dan tidak mampu merubah ketentuan pusat tersebut. Realitas ini menyebabkan banyak warga yang tidak mendapatkan BST meskipun secara kondisi social dan ekonomi seharusnya layak menerima BST.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut 1)implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Payaman antara lain sikap, perilaku, maupun tanggungjawab aparatur Pemerintah Kelurahan sudah mengarah pada adanya sikap peduli terhadap derita yang dialami warganya, perilaku yang penuh tanggungjawab dengan terus mengawal warganya yang menerima BST. Sedangkan bagi warga yang tidak menerima BST tetap dikomunikasikan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten terutama untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun cara pandang, perilaku dan tanggung jawab masyarakatnya menunjukkan realitas yang berbeda jika ditelaah dari landasan pekerjaannya. Sikap masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pada umumnya akan semakin bergantung pada BST ini. Hal ini terlihat dari menurunnya rasa percaya diri masyarakat yang pernah menjadi pekerja di pedesaan dan secara umum masih percaya bahwa bantuan akan terus muncul di masa depan.

Jadi bantuan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lain halnya dengan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang cilik. Pola pikir mereka secara umum akan lebih pasti. Dimana mereka semakin aktif karena akan mendapatkan uang untuk bisa mulai berjualan lagi.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Kelurahan diharapkan untuk lebih intens dalam mengkomunikasikan permasalahan DTKS dengan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk sehingga dalam penyaluran BST kedepannya lebih tepat sasaran.
2. Bagi Warga Kelurahan Payaman diharapkan untuk lebih proaktif dalam

mengurus DTKS baik di Pemerintah Kelurahan maupun ke Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.

REFERENSI

- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Malik, N. (2018). *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Supriatna, T. (2000). *Strategi pembangunan dan kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Teguh Imam Rahayu, A. G. (2020). *Implementasi penggunaan DD dalam pencegahan covid-19*. 1(21), 144–166.
- TNP2K, L. D. F. E. B. (2020). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Wahyu, A. P., & Hidayat, T. (2022). SISTEM INFORMASI JEJARING SOSIAL DAN FORUM DISKUSI BERBASIS PHP: SISTEM INFORMASI JEJARING SOSIAL DAN FORUM DISKUSI BERBASIS PHP. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan (JITTER)*, 8(2).
- YESIKA, I. (2021). *PEMBERDAYAAN ANGGOTA PKK DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.